

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), 2018-2020*. Bps.Go.Id.
<https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>
- BPS Jawa Barat. (2021). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), 2018-2020*. Jabar.Bps.Go.Id.
<https://jabar.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>
- BPS Kota Depok. (2021). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2018-2020*. Depokkota.Bps.Go.Id.
<https://depokkota.bps.go.id/indicator/12/30/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-.html>
- Dama, A., Saerang, D. P. E., & Gamaliel, H. (2019). Pengaruh kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 57.
<https://doi.org/10.32400/iaj.26638>
- DJP. (2021). *Presiden RI Sahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/presiden-ri-sahkan-uu-harmonisasi-peraturan-perpajakan>
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. 1–134.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020*. Kementerian Keuangan, 2020, 1–370.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021*, 1–989.
- Masdi, A. (2021). *Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>

- Ningsih, H. T. K., & Rahayu, S. (2016). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota. *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*, 2(2009), 1–15.
[https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7307/47 - Heny Triastuti Kurnia Ningsih.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7307/47-Heny%20Triastuti%20Kurnia%20Ningsih.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Pajak.go.id. (2020). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak*, 1–164. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-02/LAKIN DJP 2020.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-02/LAKIN_DJP_2020.pdf)
- Pemerintah Pusat. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. *Peraturan Presiden*, 004185, 1–35.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>
- Pemerintah Pusat. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia No 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik. *Peraturan Presiden*, 10651.
- Provinsi Jawa Barat. (2021). Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. *Keputusan Gubernur Jawa Barat*.
- Putra, M. W. P., & Kasmiarno, K. S. (2020). Pengaruh Covid-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia: Sektor Pendidikan, Ekonomi Dan Spiritual Keagamaan. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1(2), 144–159. <https://doi.org/10.53491/porosanim.v1i2.41>
- Rahman, G. A. (2018). *Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan*. 8.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dengan*. 53(9), 1689–1699.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–6.
- Resti, D., & Liana, D. (2021). *Evaluasi Program Belanja Pemulihan*. 01.
- Septiyani, C., & Sitompul, G. O. (2022). *Pengaruh Single Identity Number Terhadap Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama*. 2(4), 387–392.

- Sitanala, F. (2010). Pergerakan Penduduk Kota Depok Menuju Ke Tempat Bekerja Tahun 2001. *MAKARA of Science Series*, 9(1), 41–44.
<https://doi.org/10.7454/mss.v9i1.482>
- Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Widayati, L. S. (2021). Kebocoran Data Pribadi. *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021, 2021*.
[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu Sepekan---IV-PUSLIT-Mei-2021-186.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Mei-2021-186.pdf)
- Widianto, R. (2019). Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Single Identity Number (SIN). *Jurnal Transformasi Administrasi* , 9(April), 1–20. https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/43_penting
- Zulaikha, S. M. (2013). *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 2(2009), 1–15.